Peran Humas Diskominfo Kabupaten Bogor dalam Peliputan dan Publikasi Kegiatan sebagai Transparansi Informasi

Adinda Qothrunnada[1], Willy Bachtiar[2]
[1,2]Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB University, Indonesia
E-mail: adindanada23@gmail.com [1], willybachtiar@apps.ipb.ac.id[2]

Article History:
Received: 04 Mei 2025
Revised: 23 Juni 2025
Accepted:29 Juli 2025

Keywords: *Humas, Peliputan, Publikasi, Transparansi Informasi*

Abstract: *Perkembangan yang pesat pada era digital saat ini, keterbukaan informasi menjadi aspek penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami peran Humas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas peliputan serta publikasi kegiatan pemerintahan sebagai wujud dari transparansi informasi kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak Humas Diskominfo, didukung oleh observasi dan dokumentasi atas berbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses peliputan dan publikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Diskominfo Kabupaten Bogor menjalankan peran sebagai fasilitator informasi, media relations, serta content creator dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Publikasi dilakukan melalui berbagai platform digital seperti situs resmi dan media sosial, dengan fokus pada penyampaian informasi yang faktual, cepat, dan mudah diakses. Namun, dalam pelaksanaannya, humas menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta kebutuhan peningkatan literasi digital internal.*

PENDAHULUAN

Hadirnya internet dan media sosial membuat perkembangan teknologi informasi menjadi semakin cepat. Hal ini membuat perubahan terhadap pola dan bentuk penyebaran informasi. Perkembangan internet ini membentuk digitalisasi yang mana memungkinkan seluruh pengguna dapat mengakses informasi dengan mudah. Selain untuk kebutuhan hiburan, internet juga digunakan oleh sector pemerintah. Pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih cepat. Adanya informasi melalui internet ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai layanan publik, kebijakan dan kegiatan pemerintah. Hal ini selaras dengan Hadi & Widnyani Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) menjadi bagian penting untuk mencapai "Indonesia Emas 2045" yangmaju, berkeadilan, dan makmur melalui digitalisasi tata kelola pemerintahan, yang mana langkah ini dapat meningkatkan efektivitas administrasi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah menggunakan berbagai platform digital untuk penyampaian informasi, contohnya seperti media sosial, situs web resmi, ataupun aplikasi yang berbasis layanan publik.

Perkembangan teknologi tentunya membawa kemudahan untuk pemerintah dalam berbagai kebutuhan. Namun tidak bisa dipungkiri jika pemerintah merasakan dan mengalami tantangan akan perkembangan tersebut. Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penyebaran informasi biasanya meliputi kualitas dan keberlanjutan informasi yang akan disampaikan kepada publik. Menjaga kualitas informasi yaitu dengan mencantumkan data yang akurat di dalamnya. Saat ini banyak informasi yang kurang kredible karena tidak dilengkapi oleh sebuah data. Data dalam informasi adalah hal yang krusial karena data dapat menunjukkan informasi yang dapat dipercaya oleh publik. Selain data, penyajian informasi juga harus diperhatikan sehingga publik dengan mudah dapat memahami informasi yang ditampilkan serta meningkatkan transparansi informasi dari pemerintahan kepada publik. Hambatan lainnya seperti terbatasnya interaksi dan *feedback* yang masuk melalui platform digital. Interaksi dan *feedback* dapat membentuk komunikasi dua arah yang baik antara pihak pemerintah dan masyarakat. Menurut Sani *et al* (2020), komunikasi dua arah adalah unsur penting dalam peran humas karena dengan adanya komunikasi dua arah yang dibangun humas bisa menjadi adah yang efektifnya evaluasi bagi regulasi pemerintah. Hal ini juga dapat berdampak pada persepsi publik terhadap transparansi penyelenggaraan kegiatan maupun kebijakan pemerintahan.

Prinsip transparansi yaitu dengan membangun dan menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui platform informasi dan memiliki komitmen bagi masyarakat untuk bisa mengaksesnya dengan mudah dan praktisi (Maranjaya, 2022). Tranparansi informasi dapat terwujud dengan adanya peliputan dan publikasi kegiatan pemerintah. Peliputan dan publikasi sangat penting dilakukan untuk memastikan publik atau masyarakat dapat menerima informasi yang lebih akurat, *real time*, dan tentunya dapat dipercaya. Penerapan publikasi yang jelas dan terbuka dapat meningkatkan keterbukaan informasi tentang kebijakan serta program-program. Selain itu peliputan dan publikasi juga dapat meningkatkan interaksi dan keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan jalannya sistem pemerintahan. Adanya transparansi informasi memungkinkan masyarakat untuk dapat menilai dan mengukur efektivitas penggunaan anggaran oleh pemerintah untuk kebutuhan publik.

Maka untuk mendukung peningkatan tercapainya transparansi informasi pemerintah, Humas Diskominfo Kabupaten Bogor memiliki peran yang semakin penting dan krusial. Humas memiliki tugas untuk malakukan perencanaan, pengelolaan dan penyampaian pesan dan informasi kepada publik mengenai kegiatan dan juga kebijakan pemerintah. Penyampaian informasi ini bisa dilakukan melalui media konfensional maupun media digital. Tentu humas harus memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan pemerintah.

Humas Diskominfo Kabupaten Bogor perlu menjalankan peran dan menerapkan strategi komunikasi yang inovatif dan komunikasi dua arah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peliputan dan publikasi. Peran humas yang dapat dilakukan antara lain perencanaan sebelum liputan, pembagian *jobdesk*, pengemasan dokumentasi, dan format publikasi seperti video pendek, foto, dan *press release*. Selain itu, humas pemerintah perlu membangun kemitraan atau kerjasama dengan media massa lokal dan nasional untuk memperluas jangkauan publikasi.

Maka kegiatan pemerintah sangat diuntungkan dengan adanya humas, yang mana tugasnya dimulai dengan pusat informasi publik hingga terjalinnya komunikasi dan hubungan antara staf internal dengan pihak media (Permini & Atmaja, 2022).

Saat melaksanakan tugasnya, Humas Diskominfo Kabupaten Bogor tentu menghadapi tantangan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Luasnya informasi yang harus dipublikaskan, Humas Diskominfo Kabupaten memerlukan sumber daya manusia dan teknologi yang memenuhi untuk memengaruhi efektivitas peliputan dan publikasi kegiatan pemerintah. Tantangan tersebut menuntut humas untuk terus berinovasi dan mengembangkan pendekatan komunikasi yang lebih efektif, kreatif, dan transparan.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Chelsea Uly Artha Pandiangan dan Eny Ratnasari pada tahun 2023 dengan judul "Humas Pemerintah Dan Transparansi Informasi Untuk Membangun Kepercayaan Publik". Penelitian ini fokus untuk menguraikan implementasi transparansi informasi dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang. Hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang memiliki alur dalam peliputan dan penerapan prinsip transparansi informasi dalam peliputan. Penerapan transparansi informasi berfungsi untuk menjaga hingga meningkatkan citra serta menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "Peran Humas Diskominfo Kabupaten Bogor dalam Peliputan dan Publikasi Kegiatan sebagai Transparansi Informasi. Penelitian ini mencangkup peran serta hambatn dari kegiatan peliputan dan publikasi pada Diskominfo Kabupaten bogor.

LANDASAN TEORI

Komunikasi Pemerintah

Menurut Lukas et al (2020) bahwa komunikasi pemerintahan adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh individu yang berada di lingkungan pemerintah dan disampaikan kepada publik internal maupun eksternal. Maka Komunikasi pemerintah merupakan proses penyampaian informasi atau dari pemerintah kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kegiatan serta kebijakan yang sedang dijalankan. Komunikasi pemerintah perlu mengedepankan interaksi dua arah melalui berbagai platform digital. Komunikasi dua arah memungkinkan adanya interaksi dari masyarakat seperti memberikan masukan, kritik, dan saran kepada pemerintah. Kemampuan instansi pemerintah dalam mengelola informasi yang transparan dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi pemerintah. Dalam era digital, komunikasi pemerintah tidak hanya tersampaikan menggunakan media konvensional seperti televisi dan radio, tetapi juga dapat menggunakan platform media sosial dan website resmi. Adanya teknologi ini lah, pemerintah harus bisa memanfaatkan secara maksimal untuk mencapai audiens yang lebih luas, lebih cepat , dan efektif.

Komunikasi pemerintah juga memiliki tujuan untuk mendukung keterlibatan publik dalam proses demokrasi. Keterbukaan dan kejujuran saat berkomunikasi membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi terkait kebijakan pemerintah, serta membuka kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan atau kritik kepada pemerintah. Hal ini sangat penting untuk diterapkan untuk berfungsi memperkuat hubungan antara pemerintah dan public. Selain itu keterbukaan informasi atau komunikasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kebijakan publik. Diskominfo Kabupaten Bogor memiliki peran strategis dalam mengelola komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi yang ada.

Humas

Menurut Musi (2022), public relations atau yang dikenal sebagai hubungan masyarakat (humas) adalah suatu fungsi manajerial yang berperan dalam menilai persepsi publik, mengkaji kebijakan dan prosedur suatu individu atau organisasi berdasarkan kepentingan masyarakat, serta melaksanakan program-program yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan penerimaan dari publik. Peran humas sangat krusial dalam konteks pemerintah, humas memiliki peran untuk menyampaikan informasi yang relevan mengenai kebijakan atau kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Namun humas tidak hanya berperan untuk menyampaikan pesan, tetapi juga berfungsi sebagai penyalur masukan atau kritik dari masyarakat kepada pemerintah. Peran humas juga sangat penting untuk selalu memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan pemerintah bisa diterima dengan mudah dan baik oleh masyarakat dan dapat mempengaruhi pandangan serta sikap masyaraka terhadap kerja pemerintah.

Humas juga memiliki tugas untuk merencanakan dan melaksanakan strategi komunikasi yang efektif agar peran yang dimiliki dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat mencakup berbagai bentuk komunikasi seperti penggunaan media sosial dan acara-acara publik. Tim Humas Diskominfo Kabupaten Bogor harus memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan mengenai kegiatan pemerintah atau kebijakan daerah dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Selain mempertahankan hubungan dan komunikasi dengan masyarakat, humas juga harus berperan aktif dalam membangun hubungan dengan media massa, karena media adalah saluran yang sangat penting untuk mencapai audiens yang lebih luas. Adanya humas yang bekerja secara profesional, komunikasi pemerintah dapat berjalan lebih lancar.

Peliputan dan Publikasi

Peliputan merupakan proses yang melibatkan kegiatan pengumpulan informasi dan menyusun cerita atau narasi yang dapat dipahami oleh publik. Proses peliputan yang baik akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan harus akurat, relevan, dan menarik bagi masyarakat. Peliputan pada pemerintah tidak hanya berfungsi menyampaikan kegiatan rutin, tetapi juga berfungsi untuk penjelasan mengenai kebijakan atau keputusan yang dijalankan oleh pemerintah. Untuk itu, keakuratan dan ketepatan waktu sangat diperlukan dalam peliputan, agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang salah atau terlambat.

Langkah selanjutnya setelah peliputan yaitu publikasi. Publikasi memiliki peran sebagai sistem yang mana publikasi ini akan mengolah informasi hingga nantinya sampai pada proses informasi tersebar kepada publik (Ridwan, 2020). Tujuan adanya kegiatan peliputan dan publikasi dalam pemerintahan adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta membangun kepercayaan masyarakat Dinas pemerintah daerah seperti Diskominfo Kabupaten Bogor harus bisa memastikan untuk memanfaatkan berbagai media, baik media massa maupun media sosial dan digital. Media sosial menjadi salah satu alat yang efektif untuk penyebaran informasi, terlebih lagi yang saat ini dunia digital sangat berkembang. Selain itu, publikasi yang dilakukan dengan transparan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan kesempatan untuk memberikan feedback terhadap kebijakan yang ada.

Transparansi Informasi

Transparansi merupakan suatu keadaan di mana individu, perusahaan, organisasi, instansi, atau lembaga menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik, dengan tujuan agar pihak-pihak yang memiliki kepentingan dapat memperoleh informasi yang akurat, jujur, adil, dan mudah dipahami (Andreani & Syafini, 2022). Maka transparansi informasi publik merupakan prinsip dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan transparansi informasi di Indonesia. Transparansi informasi ini tidak hanya mencakup penyampaian informasi yang bersifat positif, tetapi juga harus menyampaikan informasi mengenai tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan, program, dan kebijakan tertentu. Adanya transparansi informasi dalam sektor pemerintah, dapat mengurangi ketidakpastian atau spekulasi dari masyarakat. Spekulasi ini yang sering kali menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Penyampaian informasi yang transparan, jelas dan terperinci membuat masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Selain itu, transparansi informasi juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kebijakan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses penyebaran informasi dilakukan secara jujur, akurat, dan dapat diakses dengan mudah oleh publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu kantor Diskominfo Kabupaten Bogor tempatnya berada di jalan Tegar Beriman no. 1, Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tim humas, observasi langsung, partisipasi aktif dari peneliti selama berada di tim Humas Diskominfo Kabupaten Bogor, dan studi literatur dari penelitian terdahulu, *e-book*, dan artikel ilmiah. Instrumen yang gunakan yaitu daftar pertanyaan dan smartphone sebagai alat bantu rekam suara selama wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan mulai dari reduksi data yaitu menyederhanakan data atau informasi yang didapatkan saat pengumpulan data, penyajian data, dan terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari seluruh penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi informasi adalah salah satu poin utama bagi pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah tersebut. Transparansi informasi dalam komunikasi publik bukan hanya menyediakan informasi, tetapi juga turut melibatkan publik atau masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keberhasilan transparansi informasi sebuah instansi pemerintah dapat dilihat dari segi keefektifan instansi tersebut dalam menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan pun harus tepat waktu, akurat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan transparansi dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong terciptanya legitimasi publik terhadap pemerintah (Sumantri, 2023). Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi informasi tersebut melalui kegiatan peliputan dan publikasi.

Peliputan kegiatan oleh Humas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor merupakan salah satu langkah awal dalam proses publikasi informasi kepada masyarakat. Peliputan dilakukan terhadap berbagai kegiatan pemerintahan, baik yang bersifat internal seperti rapat dinas maupun eksternal seperti kunjungan kerja Bupati, peluncuran program baru, atau acara seremonial yang melibatkan masyarakat. Humas Diskominfo Kabupaten Bogor menjalankan peran penting dalam menjembatani kegiatan pemerintah, khususnya aktivitas Bupati dan jajaran, dengan masyarakat luas. Fungsi ini dijalankan melalui proses peliputan langsung ke lapangan, pengumpulan bahan dokumentasi, hingga produksi konten informasi yang akan

dipublikasikan di berbagai kanal resmi.

Peran Humas dalam Peliputan dan Publikasi

1. **Peran sebagai *Strategic Communication Planner***

Sebelum melakukan tugas peliputan dan publikasi, Humas Diskominfo Kabupaten Bogor memiliki peran penting dalam merancang rencana strategi komunikasi untuk setiap kegiatan pemerintahan. Rencana strategis merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan data atau fakta yang telah diidentifikasi, serta diselaraskan dengan tujuan lembaga. (Fahruddin & Prayudha, 2023). Peran *strategic communication planner* ini diterapkan pada proses diskusi tim peliputan sebelum pelaksanaan peliputan dan publikasi. Anggota tim peliputan secara aktif berdiskusi untuk merumuskan sudut pandang (*angle*) pemberitaan, menentukan pesan utama yang akan disampaikan, dan juga menentukan format dan gaya komunikasi seperti apa yang cocok untuk disampaikan kepada khalayak berdasarkan kharakteristik yang dimiiliki.

Maka bisa dikatakan bahwa Humas Diskominfo Kabupaten Bogor tidak hanya berperan untuk menyampaikan "apa yang terjadi", tetapi juga berperan untuk menentukan "bagaimana menyampaikannya" agar informasi tersampaikan secara efektif diterima masyarakat. Selain diskusi mengenai angle pemberitaan, Humas Diskominfo Kabupaten Bogor juga berdiskusi mengenai pembagian jobdesk seperti videographer, photographer, drone pilot dan audio. Lalu tim peliputan juga menentukan device apa saja yang akan digunakan untuk dokumentasi saat peliputan. Contohnya, jika ingin memperlihatkan bahwa peliputan tidak hanya bersifat reaktif, tapi juga dipersiapkan dengan strategi visual yang kuat tim peliputan biasanya akan melibatkan teknologi seperti penggunaan drone untuk dokumentasi. *Strategic communication planner* ini juga di terapkan dalam diskusi mengenai pengemasan pesan baik dalam bentuk caption, reels, hingga press release. Sehingga humas bukan hanya berperan sebagai tim pelaksana peliputan, tetapi juga turut memastikan bahwa pesan pemerintah yang disampaikan harus dikemas, diposisikan, dan disampaikan dengan cara yang strategis dan memiliki jangkau luas.

2. **Peran sebagai *Media Relations Strategic***

Peran Humas Diskominfo Kabupaten Bogor tidak hanya sebagai tim peliputan dan publikasi, tetapi Humas Diskominfo juga memiliki peran *media relation strategic*. *Media relation strategic* berperan sebagai pengelola hubungan dan komunikasi dengan tim media massa. Hubungan ini tidak dibataskan pada kerja sama secara formal antar lembaga dengan perusahaan media saja, namun hubungan ini juga dilakukan secara interpersonal antara tim Humas Diskominfo dan tim jurnalis lainnya di lapangan. Hubungan ini dapat membentuk komunikasi dua arah di kedua tim tersebut. Komunikasi dua arah ini terbentuk dengan tujuan menyinergikan kepentingan pemerintah dan kebutuhan antar tim peliputan dalam memperoleh informasi yang valid dan aktual. Kedua tim biasanya akan saling bertukar informasi baik mengenai lokasi peliputan, kehadiran pejabat, dan informasi lainnya.

Tujuan utama dari *media relation strategic* ini adalah menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, yang mana humas dan tim media massa bisa menjadi mitra kerja dalam memberikan pelayanan informasi pemerintah kepada masyarakat. Jika hubungan ini berhasil terjalin akan menjadi satu faktor yang penting dalam mendukung kelancaran publikasi kegiatan pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi

pemerintah yang disampaikan. Selain itu menurut Pradana dan Primadini (2023) bahwa Salah satu indikator keberhasilan dalam strategi media relations adalah banyaknya pemberitaan yang memiliki nada positif maupun netral.

3. Peran sebagai Produsen Konten Pemerintah (*Government Content Creator*)

Humas Diskominfo Kabupaten Bogor menjalankan peran untuk produksi konten secara profesional. Melalui konten humas dapat menyampaikan informasi, melaksanakan kampanye, dan mempererat hubungan dengan khalayak mereka (Septia *et al*. 2024). Konten ini diproduksi berdasarkan hasil peliputan yang sebelumnya dilakukan. Bahan peliputan nantinya akan diolah untuk menghasilkan berbagai jenis konten informatif, seperti dari foto, video pendek, hingga berupa penulisan seperti *press release*. Penentuan bentuk konten ini pun telah didiskusikan sebelum melaksanakan peliputan seperti menentukan sudut pandang atau *angle* pemberitaan yang akan diambil. Hal ini menunjukkan bahwa konten yang diproduksi oleh humas merupakan konten yang terstruktur terencana dan disesuaikan oleh kebutuhan.

Proses produksi konten hasil peliputan tidak hanya diproduksi secara terstuktur tapi humas juga harus memproduksi konten secara cepat dan efisien. Setelah peliputan, tim humas akan membagi beberapa penugasan seperti editing video, pemilahan foto kegiatan, pembuatan caption, dan juga tim penulisan *press release*. Tim humas akan saling bekerja sama untuk menghindari adanya miskomunikasi antar anggota dan juga untuk menyelaraskan angle pemberitaan yang telah ditentukan.

Biasanya bahan berupa foto dan caption akan menjadi materi pertama yang harus segera diunggah di media sosial Instagram, sementara bahan audio seperti doorstop atau sambutan pejabat akan ditranskrip terlebih dahulu dan nantinya akan diolah menjadi sebuah tulisan berupa *press release*. Konten berupa video akan dikemas penjadi potongan-potongan dokumentasi kegiatan dan diupload di Instagram melalui fitur reels karena pengemasan yang ringan akan menjadi format yang mudah diterima oleh masyarakat. Sehingga Kecepatan dan keakuratan penyampaian informasi ini dilakukan agar masyarakat dapat secara cepat untuk mengetahui kegiatan atau kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Ini juga menjadi salah satu bentuk upaya dari terciptanya transparansi informasi oleh pemerintah kepada masyarakat.

4. Peran sebagai Pengelola Informasi Publik (*Public Information Officer*)

Di era keterbukaan informasi saat ini, pemerintah memiliki peran krusial dalam menjaga citra positif lembaga, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta pengelolaan informasi di tiap instansi (Pratami & Septiadi, 2021). Pengelolaan informasi harus dilakukan oleh setiap anggota humas karena humas dapat menyaring, mengemas, dan menyampaikan informasi kegiatan pemerintah kepada masyarakat dengan tepat dan akurat. Penyaringan informasi karena tidak semua informasi dan kegiatan dapat disampaikan secara mentah atau langsung. Sehingga Humas Diskominfo harus melaksanakan perannya untuk memilah mana informasi yang dapat diungkap kepada publik dan informasi yang harus dikemas secara hati-hati. Contoh informasi yang harus dikemas secara hati-hati yaitu berupa kegiatan-kegiatan internal pemerintah yang bersifat terbatas. Jadi dapat dikatakan bahwa humas melakukan penyaringan informasi setelah seluruh kegiatan diliput.

Pada dasarnya humas akan tetap melakukan peliputan ke seluruh kegiatan

pemerintah yang telah dijawalkan meskipun kegiatan tersebut bersifat internal. Walaupun pada akhirnya peliputan tersebut tidak dipublikasikan, hasil peliputan bisa sebagai bentuk dari dokumentasi dan pertanggungjawaban publik. Jika kegiatan internal dapat dipublikasikan , humas akan tetep Membuat dalam bentuk narasi publik. Tetapi humas juga harus memperhatikan bayasan-batasan informasi yang dapat dipublikasikan sehingga tidak menyalahi prinsip kerahasaan informasi pemerintah. Sehingga peran seorang humas sangat penting dalam pemerintah dimana humas harus bisa menjaga keseimbangan, kepatuhan terhadap regulasi terkait informasi yang dikecualikan sekaligus tetap mempertahankan transparansi informasi kepada publik.

5. Peran sebagai Jembatan Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

Humas sebagai fasilitator komunikasi berperan sebagai penghubung komunikasi antara organisasi dengan publiknya (Sari & Supriyanto, 2022). Komunikasi yang efektif harus terus terbentuk dan terjalin antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan keterlibatan masyarakat akan kegiatan atau kebijakan yang sedang dijalannya oleh pemerintah. Maka dibutuhkan seorang humas dalam pemerintah untuk bisa membangun komunikasi efektif tersebut. Hal ini juga berlaku pada Humas Diskominfo Kabupaten Bogor, tim humas memainkan peran sebagai jembatan utama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan oleh tim humas yaitu melalui peliputan dan publikasi kegiatan.

Humas Diskominfo Kabupaten Bogor menjadi saluran komunikasi yang menyampaikan pesan atau informasi berupa pencapaian, kebijakan, serta program kerja pemerintah secara langsung kepada publik. Jembatan komunikasi bisa dilakukan dengan mempublikasikan hasil peliputan yang telah dilakukan oleh tim humas dan telah dikemas dengan ringan. Peran ini menunjukkan fungsi humas bukan sekadar dokumentatif, tetapi juga komunikatif dan edukatif. Humas juga harus bisa menyampaikan informasi yang memiliki nilai pesan bermakna dan mudah dipahami, bukan hanya pesan yang memiliki sifat seremonial.

6. Peran sebagai Agen Transparansi Informasi Publik

Transparansi informasi menjadi unsur utama dalam sektor pemerintahan. Menurut Barimbing & Oktivia (2022) bahwa peran pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan mengembangkan aspek keterbukaan yang mudah diakses dan bersifat transparan. Transparansi informasi bisa membangun citra dan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kerja pemerintah. Sebagai bagian dari badan publik, Humas Diskominfo memiliki tanggung jawab dalam mendukung prinsip keterbukaan informasi. Ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Upaya mewujudkan transparansi itu, Humas Diskominfo melakukan peliputan dan publikasi kegiatan. Melalui kegiatan tersebut, peran humas tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menjadi alat kontrol sosial dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Informasi yang diproduksi dan disebarluaskan oleh humas berfungsi sebagai sarana transparansi kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Konten yang dikemas dengan narasi kegiatan yang faktual, dokumentatif, informastif, dan mudah diakses publik, Humas Diskominfo turut berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan

yang terbuka. Hal ini yang menempatkan humas sebagai pihak terdepan dalam membentuk budaya informasi yang sehat di lingkungan birokrasi.

Pada tahap terakhir, tim Humas Diskominfo Kabupaten akan melakukan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan serta mengetahui hal-hal yang harus diperbaiki. Humas Diskominfo melakukan evaluasi melalui rapat internal ataupun melalui *feedback* dari pihak luar seperti netizen dan wartawan. Evaluasi yang biasanya dilakukan yaitu mengenai kualitas visual, ketepatan narasi, atau kecepatan penyajian sehingga kedepannya tim humas dapat terus menyempurnakan perannya sebagai penghubung komunikasi dua arah dan agen transparansi informasi di Kabupaten Bogor.

Hambatan dalam Peliputan dan Publikasi

Pelaksanaan peliputan dan publikasi menjadi salah satu peran utama dalam tim Humas Diskominfo Kabupaten Bogor. Peliputan dan publikasi dilakukan sebagai bentuk penyampaian pesan atau komunikasi oleh pihak pemerintah kepada masyarakat. Maka bisa dikatakan bahwa Humas Diskominfo menjadi penghubung yang tepat dan akurat dalam bidang pemerintah. Menciptakan komunikasi yang tepat tentunya tidaklah mudah untuk dilakukan. Humas harus bisa membuat strategi yang tepat dan penerapan peran yang sesuai.

Humas Diskominfo Kabupaten Bogor menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dalam pelaksanaan peran ini. Hambatan bisa saja muncul dari berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kompetensi teknis yang belum merata, hingga kendala anggaran. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas peliputan dan publikasi.

Diketahui bahwa jumlah personel tim peliputan yang tersedia di Diskominfo Kabupaten Bogor masih terbatas. Keterbatasan jumlah personel inilah yang menjadi tantangan tersendiri saat peliputan, mengingat intensitas kegiatan pemerintah daerah yang cukup tinggi. Sering kali dalam satu waktu terdapat beberapa kegiatan yang berlangsung secara bersamaan di berbagai lokasi yang berbeda. Kondisi ini membuat tim peliputan cukup kewalahan dalam mendistribusikan atau menyebarkan personel secara merata. Hal ini pun mengakibatkan tidak semua kegiatan dapat terliput dan terdokumentasikan secara maksimal.

Selain itu, tidak semua anggota tim humas memiliki latar belakang atau keahlian yang memadai di bidang peliputan, penulisan jurnalistik, fotografi, videografi, serta pengelolaan konten digital. Minimnya kompetensi teknis ini sedikit berdampak pada kualitas output publikasi, baik dari segi visual, narasi, maupun ketepatan waktu. Seperti yang diketahui bahwa kualitas dan kecepatan menjadi dua unsur penting yang harus dipenuhi dalam penyampaian informasi agar publik mendapatkan informasi yang akurat, menarik, dan relevan secara tepat waktu atau *real time*.

Lalu anggaran menjadi tantangan lainnya yang dihadapi Humas Diskominfo Kabupaten Bogor. Terkadang anggaran yang tersedia untuk kegiatan peliputan dan publikasi belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan di lapangan. Hal ini mencakup pembiayaan transportasi untuk peliputan ke lokasi-lokasi yang jauh serta pemeliharaan dan pembaruan peralatan dokumentasi seperti kamera dan perangkat editing. Hal-hal tersebut merupakan aspek yang penting dalam kegiatan ini karena untuk menghasilkan materi publikasi yang berkualitas, dibutuhkan dukungan infrastruktur dan sarana yang memadai.

Hambatan-hambatan tersebut dapat mencerminkan tantangan struktural dan teknis yang dihadapi oleh Humas Diskominfo Kabupaten Bogor dalam menjalankan peran strategisnya

sebagai penyampai informasi publik secara transparan. Langkah-langkah yang strategis perlu diterapkan guna mendukung kegiatan peliputan dan publikasi secara optimal. Penerapan langkah yang tepat bisa mengontimalkan fungsi kehumasan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu tentunya humas bisa berkontribusi terhadap terwujudnya transparansi informasi publik yang lebih berkualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian pembahasan bahwa Humas Diskominfo Kabupaten Bogor memiliki peran yang signifikan dalam peliputan dan publikasi kegiatan pemerintah sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat. Humas bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses, khususnya melalui media sosial seperti Instagram. Namun, terdapat tantangan dalam mengelola interaksi dengan publik, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya respons terhadap komentar audiens. Meskipun demikian, Humas telah berupaya maksimal dalam memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi yang relevan dan mendidik.

Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi yang lebih optimal untuk mendukung kinerja Humas. Peningkatan kerjasama antara berbagai pihak terkait juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan informasi yang disampaikan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan, Humas Diskominfo Kabupaten Bogor dapat lebih maksimal menjalankan perannya dalam mendukung transparansi informasi publik dengan strategi dan perencanaan yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

Andreani, Y., & Syafina, L. (2022). Akuntanbilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntasi dan Keuangan, 1*(2). 203-209.

Barimbing, S., & Oktavia, Y. (2022). Peran Hubungan Masyarakat (Humas) dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkalis Riau. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies), 6*(2), 121-126.

Fahruddin, Z., A., & Prayudha, H., H. (2023). Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Reputasi Universitas Muhammadiyah Malang. *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKOMSI), 6*(2), 55-63

Hadi I., & Widnyani I. A. P. S. (2024). Modernisasi dan Digitalisasi Public Servis: Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Harmonisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi, 6*(2), 639-658.

Lukas, K., Pasoreh, Y., & Golung, A., M. (2020). Peranan Komunikasi Pemerintahan dalam Membangun Citra Kepemimpinan di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang-Mongondow. *Acta Diurna Komunikasi, 2*(1).

Maranjaya, A., K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), 2*(11), 929-941.

Musi dkk. (2022). Penulisan Kreatif Public Relation, Makassar: Penerbit Nas Media Pustaka

Pandiangan, C., U., A., & Ratnasari E. (2023). Humas Pemerintah dan Transparansi Informasi untuk Membangun Kepercayaan Publik. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis, 7*(2), 155-168.

Pemini, N., L., P., E., & Atmaja I., M., W., K. (2022). Peran Humas dalam Kegiatan Publikasi

Online Pemerintah di Kabupaten Badung. *Jurnal MODERAT*, *8*(3), 620-632.

Pradana, N., J., & Primadini, I. (2023). Peran Komunikasi Korporat dari PT Angkasa Pura I dalam mengimplementasikan Strategi Media Relations. *Soetomo Communication and Humanitie, 2*(2), 111-122.

Pratami, N., & Septiadi, M., A. (2021). Sosialisasi Penerapan Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi pada Pemerintah Desa Batu Itam. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, *1*(38), 131–139.

Ridwan, M. (2020). Upaya Masyarakat dalam Publikasi Destinasi Wisata untuk Peningkatan Ekonomi Desa Leuwikujang Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur, 1*(1), 30-45.

Sani, A., Hidayat M., & Sjafirah N. A. (2020). Pemahaman petugas kehumasan Kementerian Dalam Negeri tentang peran Humas Pemerintah. *PRofesi Humas, 4*(2), 215-236.

Sari, L., A., & Supriyanto, A. (2022). Peran Humas sebagai Fasilitator Publikasi Informasi dan Dokumentasi di Perguruan Tinggi, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, *13*(2), 1-5.

Septia, A., et al. (2024). Strategi Humas Sekretariat Dprd Kota Bogor dalam Membuat Konten Instagram untuk Penyebaran Informasi Publik. *HUMANUS: Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, *2*(1), 39-52.

Sumantri, I. (2023). Transparansi aalam Pemerintahan: Tinjauan Kegagalan Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Journal of Scientech Research and Development, 5*(1), 97-109.